

Megawati Instruksikan Tak Ikut Retret PDIP Masih Ingin Diperhitungkan

JAKARTA (KR) - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah (kepda) yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21-28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada Kamis (20/2), khususnya setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, ber-

tanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini (kemarin) tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

“Kepala daerah dan wakil

kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah yang diusung PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan *stand by commander call*,” sambungnya.

Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah menjalani retret di Akmil Magelang.

Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Ca-

roline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan, PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akmil, jelas menunjukkan, PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan.

Sebagai gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai, Rabu (19/2), mencapai 177 orang.

*** Bersambung hal 7 kol 1**



KR-Antara/Sulthony Hasanuddin

AKSI ELEMEN MASYARAKAT: Pengunjukrasa membawa poster saat mengikuti aksi di Jakarta, Jumat (21/2/2025). Unjukrasa yang diikuti masyarakat dari berbagai elemen tersebut salah satunya menuntut peningkatan kualitas pendidikan.

ADA BANTUAN KONSUMSI DAN LOGISTIK Hujan, Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Bertahan

JAKARTA (KR) - Meski hujan mengguyur kawasan Patung Kuda Arjuna Monas Jakarta, namun massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa tetap bertahan menggelar aksi demo, Jumat (21/2). Orator aksi terus berorasi dengan menyampaikan sejumlah tuntutan seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Minerba dan sebagainya.

Massa bertahan dengan mengenakan payung, jas hujan, bahkan ada beberapa yang tetap bertahan meski tidak memakai pelindung hujan. Sesekali ada peserta aksi yang mencoba memprovokasi petugas dengan melemparkan botol air mineral dan beberapa barang lainnya. Petugas yang berjaga juga sesekali mengimbau massa untuk tidak melempari petugas supaya ak-

si berjalan tertib.

Sebanyak 2.460 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) di Patung Kuda. “Kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo menyebutkan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemprov DKI dan instansi terkait. Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar kawasan Patung Kuda, Monas, hingga di depan Istana Negara.

Massa peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat mendapat dukungan bantuan logistik dan konsumsi dari sejumlah pihak

*** Bersambung hal 7 kol 5**

PENYIDIK KPK LAKUKAN PENDALAMAN Hasto Diduga Danai Pelarian Harun

JAKARTA (KR) - Penyidik komisi antirasuah kini tengah mendalami dugaan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai penyokong dana pelarian Harun Masiku (HM). Mengingat pelarian dari kejaran penyidik KPK hingga lima tahun lamanya membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, penyidik KPK berkeyakinan ada pihak yang mendanai pelarian buronan kasus korupsi tersebut. “Terkait tadi ada pertanyaan mengenai HM, apakah sdr HK ini penyandang dana atau membiayai? Itu juga yang sebenarnya sedang kami dalami,” kata Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat (21/2).

Menurut Asep, orang melarikan diri ti-

dak bisa kerja dan lain-lain karena ketahuan sama khalayak. Sehingga dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang menanggung. “Itu yang sedang kami dalami,” ujarnya.

Meski demikian, Asep enggan berkomentar lebih lanjut mengenai apakah penyidik KPK menemukan indikasi Hasto sebagai penyandang dana Harun Masiku, karena hal tersebut adalah bagian dari materi penyidikan. “Ini menjadi materi ya materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kami sampaikan. Jadi sabar, nanti kami tentu juga akan sampai ke sana, siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini,” kilahnya.

*** Bersambung hal 7 kol 5**



KR-Thoha

Sebagian peserta retret berjalan kaki menyeberang jalan depan Pintu Gerbang Utama Akmil.

MAGELANG (KR) - Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, yang berlangsung 21-28 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah (kepda) yang harus mengikuti retret kali ini 503 orang, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya 47 orang lain belum hadir.

“Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan tanda gelang merah, artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

Ia mengatakan, kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret, namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Ia menyebutkan, terdapat enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena sakit.

“Dari enam kepala da-

erah itu karena memang sakit jadi dapat memahami ketidakhadiran mereka,” ujarnya.

Namun demikian, ia menyampaikan, karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

“Penting, materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga stakeholder kabupaten atau kota masing-masing, oleh karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya,” katanya.

Ia menuturkan, kegiatan retret ini tidak saja untuk

memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah serta memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lainnya.

“Kemudian untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini (kemarin) datangnya terlambat dan untuk hal-hal lain, maka mengirimkan wakilnya,” katanya.

Dilaporkan dari Magelang, para kepala daerah terlebih dulu berkumpul di Lapangan Rindam IV/Diponegoro Magelang. Sekitar pukul 15.00 peserta menuju ke Wisma Sumbing dengan naik bus.

Saat turun dari kendaraan bus, dan berjalan

kaki menuju ke Wisma Sumbing, mereka sudah mengenakan pakaian seragam Komponen Cadangan (Komcad). Kemudian mereka berbaris dan berjalan kaki memasuki Akmil melalui pintu gerbang utama.

Gubernur Akmil Mayjen TNI Arnold Aristoteles PR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya S turut menyambut di pintu gerbang. Kedatangan peserta juga disambut Drumband Gendang Seruling Canka Lokananta Taruna Akademi Militer. Setelah itu para peserta kembali ke tenda lokasi Magelang Retret 2025 dengan naik bus.

(Tha)-f

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:55	15:01	18:04	19:14	04:26
Sabtu, 22 Februari 2025					
Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY					



FENOMENA #kabursajadulu menjadi trend di Indonesia dan mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan. Hasil survey saya di kelas sarjana dan pasca sarjana sejumlah 250 mahasiswa, hanya ada 3 mahasiswa yang berpikir kabur dari Indonesia setelah lulus yaitu ke Singapura, Australia dan Eropa. Apa yang menyebabkan 247 mahasiswa tidak memilih kabur? Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan bahasa selain bahasa Indonesia, tidak memiliki keterampilan yang memadai atau kompetitif di bidangnya sejalan dengan jurusan yang saat ini dipilih, tidak memiliki pengalaman magang di luar negeri. Mereka masih tetap ingin bekerja di Indonesia meski biaya studi selama kuliah tidak sebanding dengan gaji yang diterima nanti saat bekerja.

Menurut data kemendikbudristek tahun 2024 bahwa setiap tahun ada kurang lebih 1,4 juta lulusan sarjana pertahun, sedangkan menurut kementerian tenaga kerja hanya ada lowongan sebesar 10%. Sehingga antara lulusan dan

*** Bersambung hal 7 kol 1**

SLEMAN (KR) - Pemda

DIY melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asesmen Tahunan Reformasi Kalurahan. Bimtek ini bertujuan mengetahui progres pelaksanaan Reformasi Kalurahan (R-Kal) Tahun 2024.

Kepala DPMKKPS DIY KPH Yudanegara PhD menuturkan, kegiatan Bimtek ditujukan untuk seluruh kapanewon di DIY, sebagai tindaklanjut asesmen awal yang sudah dilaksanakan pertengahan 2024.

“Kami sudah mengawali acara Bimtek ini sejak Selasa di Gunungkidul, Rabu di Kulonprogo dan Kamis di Sleman, Jumat di Bantul. Kami melibatkan seluruh unsur kapanewon dari

Jawatan Praja maupun Jawatan Kemakmuran, untuk Reformasi Birokrasi Kalurahan (RBKal) dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (RPMKal),” jelas pria yang

biasa disapa Kanjeng Yudanegara ini, Kamis (20/2). Bimtek ini menurut Kanjeng Yudanegara, sebagai tindaklanjut dari Visi-Misi Gubernur DIY tentang Reformasi Kalurahan yang



KR-Istimewa

Peserta Bimtek Asesmen Tahunan Reformasi Kalurahan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY di Hotel Prima SR, Sleman, Kamis (20/2/2025).

dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Kanjeng Yudanegara menyebut, hasil asesmen

berupa penilaian dari kapanewon kepada setiap kalurahan di wilayah masing-masing.

*** Bersambung hal 7 kol 1**



● SAAT saya makan di angkringan, datang seorang remaja pria bertanya kepada penjual, “Pak, di sini bisa bayar pakai QRIS gak?” Penjual angkringan menjawab, “Tidak bisa.” Setelah remaja itu pergi, si penjual angkringan berseloroh, “Sini gak punya keris, punyaanya pisau.” (Amin Sahri, Jalan Tri Dharma 898 Baciro, Gondokusuman Yogyakarta 55225)-f